

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Audit

Pengertian Audit menurut A Statement of Basic Auditing Concepts atau yang disingkat ASOBAC menyatakan Audit merupakan sebuah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti kejadian ekonomi secara objektif mengenai kebijakan serta aktivitas ekonomi untuk menentukan tingkat kecocokan/kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Menurut PSAK (2006) audit adalah suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh serta mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang aktivitas ekonomi untuk lebih meyakinkan tingkat keterkaitan hubungan antara asersi atau pernyataan dengan kenyataan kriteria yang sudah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang memiliki kepentingan.

Menurut Sukrisno (2012:2), audit merupakan salah satu bentuk attestasi. Attestasi, pengertian umumnya merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulan tentang realibilitas dari pernyataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih sempit attestasi merupakan komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai realibilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya.

Secara umum pengertian di atas dapat diartikan bahwa audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.1.2 *Going Concern*

Going Concern adalah suatu dalil yang menyatakan bahwa kesatuan usaha akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab serta aktifitas-aktifitasnya yang tidak berhenti (Belkoui : 271). Dalil ini memberi gambaran bahwa suatu perusahaan berharap akan terus beroperasi dan tidak akan dilikuiditas di masa yang akan datang. Dengan harapan bahwa perusahaan terus beroperasi. Istilah *going concern* memiliki padanan kata sebagai kelangsungan usaha yang biasa digunakan di bidang akuntansi berkaitan dengan laporan keuangan yang dibuat seorang akuntan public (Ginting, 2018). *Going concern* menurut Aulia, *et al* (2021) merupakan kondisi dimana perusahaan diperkirakan akan berlanjut di masa mendatang dalam jangka waktu yang tidak terbatas. *Going concern* menjadi salah satu prinsip dasar dalam menyusun laporan keuangan.

Beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan (Arens, *et al*, 2015) adalah :

- a. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja.
- b. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek.
- c. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi, banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa
- d. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

2.1.3 Pengendalian Internal

Considine *et.al.*, (2012:305) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk membantu dalam mencapai tujuan operasional yang efisien, pelaporan yang andal, dan lepatuhan terhadap undang-undang yang relevan. Pengendalian internal merupakan suatu

prosedur dan tatacara suatu entitas yang diterapkan untuk menciptakan operasi usaha yang efektivitas dan efisiensi, laporan keuangan yang andal dan memberi kepastian mengenai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Proses tersebut umumnya diinisiasi oleh pemilik usaha, dewan direksi, atau pihak manajemen perusahaan (Weli, 2019). Sedangkan menurut COSO (2013:3) mendefinisikan pengendalian internal adalah pengaruh dari dewan direksi, entitas manajemen dan personil lainnya terhadap proses yang terjadi sebagai penjamin dalam pencapaian tujuan perusahaan baik terkait dengan operasi, pelaporan maupun kepatuhan.

Memperhatikan pengertian pengendalian internal menurut COSO tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya pengendalian internal yang ideal dirancang, namun keberhasilannya tergantung pada kompetisi dan kendala dari pada pelaksanaannya yang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.

COSO (2013:4) menyatakan mengenai unsur-unsur pengendalian internal yang terdiri dari lima komponen yaitu :

- (1) Control Environment/Lingkungan pengendalian,
- (2) Risk Assessment/Penilaian resiko,
- (3) Control Activities/Aktivitas Pengendalian,
- (4) Information and Communication/Komunikasi dan informasi,
- (5) Monitoring Activities/aktivitas pemantauan.

Adapun hubungan di antara kelima tujuan dan komponen-komponen pengendalian internal tersebut digambarkan oleh COSO (2013:5) dalam bentuk kubus sebagai berikut :



Gambar 1. Hubungan antara tujuan dan komponen COSO

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur. COSO (2013:4-6) menjelaskan mengenai komponen lingkungan pengendalian (*control environment*) yaitu suatu proses, standar, struktur sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal dalam organisasi, yang ditetapkan oleh dewan direksi dan manajemen senior tentang pentingnya pengendalian internal termasuk standar perilaku yang diharapkan.

Berdasarkan rumusan COSO bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari lima komponen yaitu :

- (1) Integritas dan nilai etika organisasi.

Integritas dan nilai-nilai etika merupakan produk dari standar etika dan sikap sebuah entitas, sebagaimana dengan seberapa baik hal tersebut dikomunikasikan dan diterapkan dalam praktiknya. Integritas dan nilai-nilai etika mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi insentif dan godaan yang dapat mendorong personil untuk terlibat dalam perilaku yang tidak jujur, ilegal atau tidak etis.

(2) Komitmen terhadap Kompetensi

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan yang bertujuan untuk mencapai tugas-tugas yang mendefinisikan tugas setiap orang. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat kompetensi tersebut diterjemahkan ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

(3) Struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Struktur organisasi suatu entitas mendefinisikan jalur tanggung jawab dan otoritas yang ada. Dengan memahami struktur organisasi suatu entitas maka kita dapat mempelajari manajemen dan elemen-elemen fungsional bisnis serta persepsi mengenai bagaimana pengendalian diterapkan.

(4) Proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten.

(5) Ketegasan mengenai tolak ukur kinerja, insentif, dan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas kinerja.

(6) Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia

Aspek pengendalian internal yang paling penting adalah personel. Jika karyawan kompeten dan dapat dipercaya, pengendalian lainnya dapat ditiadakan, dan laporan keuangan yang andal masih dapat dihasilkan. Orang yang tidak kompeten dan tidak jujur dapat membuat sistem menjadi kacau meskipun terdapat berbagai pengendalian

yang diterapkan. Orang-orang yang jujur dan efisien mampu bekerja dengan kinerja yang sangat baik meskipun hanya terdapat sedikit pengendalian yang mendukung mereka

Lingkungan pengendalian yang dihasilkan memiliki dampak yang luas pada sistem secara keseluruhan pengendalian internal. Selanjutnya, COSO (2013:7) menyatakan, bahwa terdapat lima prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian, yaitu :

- (1) Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
- (2) Dewan direksi menunjukkan kemandirian dari manajemen dan latihan yang mengawasi perkembangan dan kinerja pengendalian internal.
- (3) Manajemen menetapkan, dengan pengawasan dewan, struktur, jalur pelaporan, dan otoritas dan tanggung jawab yang tepat dalam mengejar tujuan.
- (4) Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan.
- (5) Organisasi meminta pertanggungjawaban individu atas tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan.

Faktor – faktor yang terkandung dalam lingkungan pengendalian :

1. *Philosophy Management*

Philosophy management dan gaya operasi manajemen menurunkan kunci yang ditetapkan untuk mengendalikan lingkungan dalam organisasi. Karakter filosofi dan gaya operasi manajemen yang berpengaruh besar terhadap lingkungan pengendalian adalah :

- a. Pendekatan untuk memantau risiko bisnis
- b. Penekanan pada pencapaian anggaran dan laba

c. Sikap dan tindakan terhadap laporan keuangan

2. Struktur organisasi

Struktur organisasi berkontribusi pada lingkungan pengendalian yang baik. Hal ini karena adanya kerangka yang menyeluruh untuk perencanaan, koordinasi dan pengendalian operasi. Struktur organisasi sebuah perusahaan meliputi :

- a. Bentuk dan sifat unit operasi, termasuk identifikasi fungsi-fungsi manajemen yang berhubungan dengan pelaporan
- b. Penugasan dan tanggung jawab delegasi kekuasaan yang biasanya tergambar dalam bagan struktur organisasi

3. Direksi dan Komite Pemeriksa

Komite pemeriksa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatasi praktik pelaporan keuangan perusahaan. Komite pemeriksa juga membantu struktur keuangan dalam menyelesaikan fungsi pertanggungjawaban. Komite pemeriksa mempunyai hubungan langsung yang baik dengan pemeriksa internal maupun eksternal.

4. Komitmen terhadap kompetensi

Hal tersebut berhubungan dengan kemampuan manajemen dalam mengawasi secara efektif aktifitas perusahaan. Kunci-kunci yang dilakukan oleh manajemen :

a. Anggaran

Penetapan dan pengkomunikasian perencanaan manajemen bagi seluruh kegiatan perusahaan. Anggaran digunakan sebagai dasar pengeluaran prestasi dan mengoreksi serta membenarkan tindakan yang telah ada penyimpangan dari yang diharapkan

b. Pelaporan

Sistem yang efektif dari berbagai tingkatan manajemen menunjukkan lingkungan pengendalian yang sehat. Jika laporan tersebut dievaluasi secara baik, maka dapat digunakan untuk mengukur prestasi disini

5. Pemeriksa internal

Mengkontribusikan terhadap lingkungan pengendalian dengan membantu manajemen memonitor keefektifan dari pengendalian yang lain. Lagi pula, pemeriksa internal dapat mengkonstruksikan saran untuk perbaikan struktur pengendalian. Pemeriksa internal harus independen dari unit-unit yang ada di perusahaan, dan harus membuat laporan langsung ke manajemen tingkat atas.

6. Pemberian wewenang dan tanggung jawab

Menetapkan wewenang dan tanggung jawab keberhasilan pengendalian dalam suatu organisasi tercapai jika pertanggung jawaban secara jelas ditetapkan dan komunikasinya, misalnya deskripsi pekerjaan yang tertulis harus menunjukkan secara jelas tugas khusus, hubungan laporan, dan kendala-kendala.

7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Dasar paling pokok dalam lingkungan pengendalian adalah kecakapan dan kejujuran karyawan yang melaksanakan yang melaksanakan kebijakan. Karyawan juga harus dikerjakan dalam jumlah yang cukup dan diberikan sumber daya yang dibebankan dengan tanggung jawabnya.

8. Pengaruh Eksternal

Keberhasilan pengendalian sebuah entitas sangat dipengaruhi oleh keberadaan atas pengawasan dan kepatuhan yang dibutuhkan dengan badan pembuat undangundang (legislatif) dan undang-undangnya itu sendiri.

2. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

COSO (2013:5) menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian (*control activities*). Kegiatan pengendalian adalah arahan manajemen untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan dengan tindakan yang dilakukan melalui kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Aktivitas kontrol dilakukan di semua tingkat entitas, di berbagai tahapan dalam proses bisnis, dan di atas lingkungan teknologi. Mereka mungkin bersifat preventif atau detektif dan dapat mencakup berbagai kegiatan manual dan otomatis seperti otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan tinjauan kinerja bisnis. Segregasi tugas biasanya dibangun ke dalam pemilihan dan pengembangan kegiatan kontrol. Di mana pemisahan tugas tidak praktis, manajemen memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian alternatif.

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tindakan dan fungsi organisasi.

Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda, seperti : otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi. COSO (2013:7) menegaskan mengenai tiga prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian yaitu :

(1) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tingkat yang dapat diterima.

(2) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.

(3) Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.

3. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

COSO (2013:4) menjelaskan mengenai komponen penilaian risiko (*risk assessment*). Risiko adalah peristiwa atau kejadian yang mungkin ada dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Penilaian risiko melibatkan proses dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko terhadap pencapaian tujuan ini dari seluruh entitas dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. *Precondition to risk assessment* adalah penetapan tujuan, yang dikaitkan pada berbagai tingkat entitas. Manajemen menetapkan tujuan dalam kategori yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan kejelasan yang cukup untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko terhadap tujuan tersebut. Manajemen juga mempertimbangkan kesesuaian tujuan untuk entitas. Penilaian risiko juga membutuhkan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan eksternal dan dalam model bisnisnya sendiri yang dapat membuat pengendalian internal menjadi tidak efektif.

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi.

Selanjutnya, COSO (2013:7) menjelaskan mengenai empat prinsip yang mendukung penilaian risiko yaitu :

(1) Organisasi menentukan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.

(2) Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuannya di seluruh entitas dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

(3) Organisasi mempertimbangkan potensi penipuan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.

(4) Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat berdampak signifikan pada sistem pengendalian internal.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

COSO (2013:5) menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi (*information and communication*) dalam pengendalian internal. Informasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuannya. Manajemen memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas dari sumber internal dan eksternal untuk mendukung fungsi komponen lain dari pengendalian internal. Komunikasi adalah proses berulang yang terusmenerus memberikan, berbagi, dan memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi internal adalah sarana dimana informasi disebarkan ke seluruh organisasi, mengalir naik, turun, dan melintasi entitas. Ini memungkinkan personil untuk menerima pesan yang jelas dari manajemen senior yang mengontrol tanggung jawab harus dianggap serius. Komunikasi eksternal ada dua: memungkinkan komunikasi masuk informasi eksternal yang relevan, dan memberikan informasi kepada pihak eksternal sebagai tanggapan terhadap persyaratan dan harapan.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh COSO di atas, bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan

manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu.

COSO (2013:7) selanjutnya menegaskan mengenai tiga prinsip dalam organisasi yang mendukung komponen informasi dan komunikasi yaitu :

(1) Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian internal.

(2) Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal, yang diperlukan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.

(3) Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

COSO (2013:5) menjelaskan mengenai komponen aktivitas pemantauan (*monitoring activities*) dalam pengendalian internal yaitu evaluasi yang sedang berlangsung, evaluasi terpisah, atau beberapa kombinasi dari keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal, termasuk kontrol untuk mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, hadir dan berfungsi. Evaluasi berkelanjutan, dibangun dalam proses bisnis di berbagai tingkat entitas, memberikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah, dilakukan secara berkala, akan bervariasi dalam cakupan dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi yang sedang berlangsung, dan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan dievaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh

regulator, badan atau manajemen standar yang diakui dan dewan direksi, dan kekurangan dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi sebagaimana mestinya.

Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Pemantauan seharusnya dilaksanakan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat, guna menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah disesuaikan dengan perubahan keadaan yang selalu dinamis.

Komponen Pengendalian	Prinsip-prinsip Pengendalian Internal
Lingkungan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika 2. Melaksanakan tanggung jawab pengawasan 3. Menetapkan struktur, wewenang dan tanggung jawab 4. Komitmen terhadap kompetensi 5. Mendorong akuntabilitas atas pengendalian internal
Penilaian Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 6. Menentukan tujuan 7. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko 8. Menilai risiko fraud 9. Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan signifikan
Aktivitas Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 10. Mengembangkan kegiatan pengendalian 11. Mengembangkan pengendalian umum atas teknologi 12. Merinci kedalam kebijakan dan prosedur
Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 13. Menggunakan informasi yang relevan 14. Komunikasi internal yang efektif 15. Komunikasi eksternal yang efektif

Aktivitas Pemantauan	16. Evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah 17. Mengevaluasi dan melaporkan setiap kekurangan
----------------------	---

Sumber : COSO, 2013 : 6-7

Keterbatasan Pengendalian Internal

Pelaksanaan struktur pengendalian intern yang efisien dan efektif haruslah mencerminkan keadaan yang ideal. Namun dalam kenyataannya hal ini sulit untuk dicapai, karena dalam pelaksanaannya struktur pengendalian intern mempunyai keterbatasan-keterbatasan. COSO (2013:9) menjelaskan mengenai keterbatasan-keterbatasan pengendalian internal sebagaimana yang dirumuskan dalam Internal Control Integrated Frame work . Kerangka ini mengakui bahwa sementara pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar untuk mencapai tujuan entitas, batasan memang ada. Pengendalian internal tidak dapat mencegah penilaian buruk atau keputusan, atau peristiwa eksternal yang dapat menyebabkan organisasi gagal mencapai tujuan operasionalnya. Dengan kata lain, bahkan sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengalami kegagalan. Keterbatasan dapat terjadi karena enam akibat yaitu :

- (1) Kesesuaian tujuan yang ditetapkan sebagai prakondisi untuk pengendalian internal.
- (2) Realitas bahwa penilaian manusia dalam pengambilan keputusan bisa salah dan tunduk pada bias.
- (3) Perincian yang dapat terjadi karena kegagalan manusia seperti kesalahan sederhana.
- (4) Kemampuan manajemen untuk mengesampingkan pengendalian internal.
- (5) Kemampuan manajemen, personel lain, dan / atau pihak ketiga untuk menghindari kontrol melalui kolusi.
- (6) Peristiwa eksternal di luar kendali organisasi.

Berdasarkan uraian COSO, bahwa pengendalian internal tidak bisa mencegah penilaian buruk atau keputusan, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dengan kata lain, bahkan sistem pengendalian intern yang efektif dapat mengalami kegagalan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa keterbatasan-keterbatasan yang ada mungkin terjadi sebagai hasil dari penetapan tujuan-tujuan yang menjadi prasyarat untuk pengendalian internal tidak tepat, penilaian manusia dalam pengambilan keputusan yang dapat salah dan bias, faktor kesalahan/kegagalan manusia sebagai pelaksana, kemampuan manajemen untuk mengesampingkan pengendalian internal, kemampuan manajemen, personel lainnya, ataupun pihak ketiga untuk menghindari kolusi, dan juga peristiwa-peristiwa eksternal yang berada di luar kendali organisasi.

Romney & Steinbart (2018:198) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki 3 fungsi penting, yaitu :

1. *Preventive Controls*

Pengendalian ini merupakan pengendalian internal untuk mencegah masalah sebelum timbul. Contohnya seperti merekrut personil yang terqualifikasi, memisahkan tugas antar karyawan, dan melakukan pengendalian terhadap aset dan informasi.

2. *Detective Controls*

Pengendalian ini merupakan pengendalian internal untuk menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Contohnya seperti pemeriksaan ulang terhadap perhitungan dan menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo (trial balance) bulanan.

3. *Corrective Controls*

Pengendalian ini merupakan pengendalian internal yang berguna mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang ditemukan serta memulihkan kembali dari kesalahan tersebut. Contohnya seperti mempertahankan salinan cadangan dokumen, memperbaiki kesalahan dalam entri data, dan mengirimkan kembali transaksi untuk pemrosesan selanjutnya.

Konsep Dasar Pengendalian Internal

Mulyadi (2013) mengemukakan beberapa konsep dasar pengendalian :

1. Merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan perpasif tertentu yang berfokus pada suatu tujuan.
2. Dijalankan oleh orang. Pengendalian internal bukanlah sebatas pedoman kebijakan dan formulir, akan tetapi pengendalian internal dilaksanakan oleh personil di setiap jenjang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya.
3. Diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bagi dewan-dewan komisaris dan manajemen entitas. Keyakinan tersebut bukanlah keyakinan mutlak karena pengendalian internal memiliki keterbatasan-keterbatasan.
4. Ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan, yakni pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

Konsep-konsep dasar pengendalian internal tersebut merupakan suatu konsep yang dapat diterapkan sebagai acuan bukan hanya untuk entitas besar, namun juga entitas kecil dan menengah dalam rangka mencapai tujuan entitas. Konsep tersebut perlu ditaati oleh seluruh jenjang personil sehingga tujuan entitas dapat diraih secara efektif.

Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang dirancang oleh suatu entitas memiliki tujuan tertentu, tentunya dalam proses pencapaian tersebut entitas perlu mempertimbangkan konsep biaya dan manfaat. Beberapa tujuan pengendalian internal diungkapkan sebagai berikut :

Saadah (2019) mengemukakan bahwa tujuan pengendalian internal adalah :

1. *Reliability of financial reporting* (keandalan dalam laporan keuangan)

Laporan keuangan merupakan media yang digunakan oleh manajemen dalam mengkomunikasikan kondisi perusahaannya dan sebagai sarana pertanggungjawaban hukum dan profesionalitas manajemen kepada investor, kreditor dan para pengguna laporan keuangan lainnya.

2. Aktivitas operasional perusahaan yang efektif dan efisien

Pengendalian internal dimaksudkan agar kegiatan operasional entitas dapat berjalan secara efisien dalam penggunaan sumber daya entitas namun tujuan entitas dapat dicapai secara efektif.

3. Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum

Salah satu tujuan pengendalian internal adalah agar entitas dapat mentaati peraturan dan hukum, karena tidak sedikit aturan dan hukum melekat pada entitas dalam menjalankan operasinya seperti aturan perpajakan yang belakangan ini pihak pemerintah menaruh perhatian lebih kepada entitas kecil dan menengah dalam peraturan perpajakannya.

Dilaksanakannya pengendalian internal tidak menjamin suatu entitas sepenuhnya dapat mencapai tujuan-tujuan pengendalian Intern di atas. Namun setidaknya, pengendalian Intern dapat meminimalisir resiko terhadap penyalahgunaan dan kesalahan dalam operasional entitas.

2.1.4 UMKM

Menurut Yulhendri (2020), Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah tonggak perekonomian Indonesia. Menurut informasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI, UMKM menyumbang beberapa kontribusi, yaitu peran UMKM menciptakan investasi nasional, peran UMKM terhadap PDB, serta perannya dalam menyerap tenaga kerja baru. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka

merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap

hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Kriteria UMKM :

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.

2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

Peranan UMKM

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah :

- a) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil samping dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.

- c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
 - d) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
- 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

UMKM yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu UMKM Re Kha Coffee yang beralamat di Jl. Bangunan Timur No.29, RW.1, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Saadah (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa secara umum efektivitas pengendalian intern yang ditetapkan para pengiat UMKM di Kota Bandung dinilai cukup baik. Setiawan, dkk (2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa dalam UMKM yang diteliti telah menerapkan komponen pengendalian intern secara memadai karena adanya keterlibatan pemilik secara langsung pada usaha tersebut. Dalam hal pencapaian tujuan perusahaan, yaitu pelaporan keuangan, UMKM yang diteliti sudah membuat laporan keuangan secara mandiri karena mempertimbangkan factor biaya jika menggunakan pihak konsultan yang mahal dan sebagian besar pelaku UMKM sudah memiliki kemampuan akuntansi. Namun untuk laporan pajak pada umumnya, UMKM yang diteliti membuat dan melaporkannya dengan bantuan konsultan karena mereka kurang memahami peraturan perpajakan yang sering kali berubah.

Fitranty dan Baridwan (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tiap pelaku bisnis mempunyai style tersendiri dalam mengimplementasikan aturan dan standart, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa tiap orang mempunyai perbedaan makna mengenai pengendalian internal, tidak terlepas dari seberapa dalam

pengetahuan mereka tentang pengendalian internal secara teori. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, dkk (2021) bahwa semakin kuat pengendalian internal di suatu perusahaan maka kecurangan perusahaan akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin lemah pengendalian internal di suatu perusahaan maka kecenderungan kecurangan perusahaan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Fario dan Cardo (2022) menyebutkan bahwa system pengendalian internal, sumber daya keuangan dan *cost leadership strategy* berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kota Batam.

Penelitian yang dilakukan oleh Bure dan Tengeh (2019) menyebutkan bahwa pengendalian internal konvensional yang kebiasaan di perusahaan bisnis lebih besar tidak ada atau tidak diterapkan secara memadai di UKM. Perbandingan lintas gender menyarankan bahwa UKM yang dipimpin perempuan lebih memungkinkan untuk menerapkan system pengendalian internal daripada rekan laki-laki. Lolita Velite (2020) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa manajemen UMKM tidak mempraktekan standar keuangan yang berlaku umum pengelolaan dan pengendalian usaha yang menimbulkan beberapa ancaman terhadap keberlanjutan usaha, dalam penelitian yang dilakukan oleh Tam dan Tuan (2021) disebutkan bahwa lingkungan pengendalian merupakan dimensi pengendalian internal yang memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UKM. Dimensi lain dari pengendalian internal diantaranya yaitu pengendalian, informasi dan komunikasi system, penilai risiko dan aktivitas pemantauan.

Penelitian yang dilakukan oleh Joelle (2019) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengendalian internal dan kinerja keuangan. Kegiatan pengendalian internal harus menyoroti kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan dari manajemen, bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Garcia, dkk (2021) bahwa dalam sebuah UMKM tidak memiliki factor pengendalian internal formal yang membantu untuk meningkatkan manajemen, karena adanya saling keterkaitan dan berfungsi dengan baik akan mengarah pada penggunaan

ekonomi, manusia dan sumber daya teknis. Santosa, dkk (2019) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa masalah utama UKM adalah sumber daya manusia, banyak factor yang menjadi masalah dalam UKM seperti target pasar dan strategi bisnis, semua UKM memiliki system sendiri untuk mengendalikannya dan banyak UKM yang berkolaborasi untuk mencapai keinginan pelanggan.

M Sodeinde, dkk (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kemungkinan UKM akan memiliki tingkat kinerja operasi tingkat tinggi dalam hal laba tahunan actual yang lebih meningkat, ketika ada peningkatan dalam kontrol lingkungan dan aktivitas pengendalian bahwa kemungkinan akan menurun. Komponen system pengendalian internal tidak mempengaruhi terhadap kinerja operasi UKM di Negara Bagian Ondo, meskipun lingkungan control dan aktivitas pengendalian memiliki dampak positif pada kemungkinan pencatatan perusahaan kinerja operasi yang tinggi. Oleh karena itu, UKM harus mempertahankan dan memanfaatkan hal-hal positif dampak lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian untuk meningkatkan operasi kinerjanya. Le Roux, dkk (2018) menyebutkan bahwa UKM Afrika Selatan menggunakan inisiatif pengendalian internal yang disesuaikan yang sering dipandang tidak memadai atau tidak efektif. Hal ini dapat mengakibatkan keberlanjutan badan usaha tersebut menjadi terpengaruh.

Weli (2019) menyebutkan bahwa implementasi sistem informasi akuntan dan sistem pengendalian internal pada UKM di Pulogadung Jakarta Timur, secara umum, masih rendah. Perusahaan belum merasakan kebutuhan untuk menerapkan catatan akuntansi double-entry, meskipun analisis menunjukkan hanya setengah dari responden UKM telah mencatat transaksi harian, nampaknya catatan hanya dilakukan secara tradisional pada buku pembelian, penjualan, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, dan penerimaan kas, dan separuh dari responden tidak melakukan pencatatan terhadap aset tetap mereka. Selain itu semua catatan belum mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum. Praktik pelaporan oleh kebanyakan perusahaan hanya pada penyajian laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan sementara laporan lainnya masih diterapkan oleh beberapa perusahaan saja.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian difokuskan terhadap praktik kepatuhan pengendalian internal yang saat ini dilakukan oleh UMKM Re Kha Coffee serta hal ini menjadi pedoman pada kebijakan dalam implementasi kepatuhan pengendalian internal bagi management dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mencerminkan pengendalian internal yang telah dilakukan atau tidaknya dengan standar yang berlaku.

2.3.1 Kerangka Fikir

